



2024

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp.+62 21 23951100

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2025
Kepala Biro Manajemen Kinerja
dan Kerja Sama

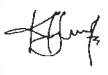
ARIF RAHMAN
NIP. 196606021992021001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Setmenko Infra) Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan baru terbentuknya Kemenko Infra yakni dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian/Lembaga, dimana Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi salah satu Kementerian Koordinator pada Kabinet Merah Putih, maka Laporan Kinerja ini hanya memuat kinerja Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selama periode Oktober s.d. Desember 2024.

Laporan kinerja ini memuat capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan *quick wins* Sekretariat Kemenko Infra. Dengan tersusunnya laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya.

Lembar Paraf		
1	Kepala Biro MKKS	
2	Koordinator AKRB	

Sekretaris Kementerian Koordinator,



Ayodhia G. L. Kalake

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Setmenko Infra) Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan baru terbentuknya Kemenko Infra yakni dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian/Lembaga, dimana Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi salah satu Kementerian Koordinator pada Kabinet Merah Putih, maka Laporan Kinerja ini hanya memuat kinerja Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selama periode Oktober s.d. Desember 2024.

Laporan kinerja ini memuat capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan *quick wins* Sekretariat Kemenko Infra. Dengan tersusunnya laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya.

Sekretaris Kementerian Koordinator,



Ayodhia G. L. Kalake

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Setmenko Infra) berhasil disusun atas kontribusi semua pihak. Penyusunan Laporan ini untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistematika penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian pada Kabinet Merah Putih, maka laporan yang disampaikan merupakan capaian atas *quick wins* dari unit kerja Sekretariat Kemenko Infra periode Oktober sd. Desember 2024. Selain belum ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Infra periode 2024-2029, juga belum adanya dokumen Perjanjian Kinerja seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra.

Hingga Desember 2024, *quick wins* yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kemenko Infra yakni:

1. Percepatan pengembangan organisasi Kementerian Koordinator, antara lain:
 - a. Penyusunan Permenko SOTK tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kemenko
 - b. Percepatan rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia, baik pegawai maupun pejabat kementerian
2. Menyusun Perencanaan Infrastruktur Strategis
3. Mengoordinasikan program 100 hari Kementerian/Lembaga sektor Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Anggaran yang digunakan oleh Kemenko Infra selama kinerja periode Oktober s.d Desember 2024 yakni sisa anggaran yang dimiliki Kemenko Marves, sehingga nomenklatur mata anggaran yang digunakan masih menggunakan unit kerja lingkup Kemenko Marves. Realisasi anggaran periode Oktober s.d Desember 2024 yakni sebesar Rp22.676.724.033,00 (*Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp29.771.939.027,00 (*Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah*) atau 76,17%. Adapun rincian realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1 Realisasi Anggaran Periode Oktober s.d Desember Tahun 2024

Deskripsi	Pagu Awal (Rp)	Pagu Oktober s.d Desember (Rp)	Realisasi		Sisa
			Rp	%	
Kementerian Koordinator Bidang	310.723.938.000	39.602.647.659	31.658.677.189	79,94	7.943.970.470

Deskripsi	Pagu Awal (Rp)	Pagu Oktober s.d Desember (Rp)	Realisasi		Sisa
			Rp	%	
Kemaritiman dan Investasi					
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	203.179.955.000	29.771.939.027	22.676.724.033	76,17	7.095.214.994
Biro Umum	158.040.100.000	24.082.869.967	18.184.685.058	75,51	5.898.184.909
Biro Perencanaan	7.844.952.000	2.071.113.751	1.480.713.458	71,49	590.400.293
Biro Hukum	7.973.140.000	1.110.658.375	1.082.776.106	97,49	27.882.269
Biro Komunikasi	24.379.847.000	1.949.959.578	1.380.255.100	70,78	569.704.478
Staf Ahli Menteri	1.443.332.000	236.576.864	236.557.300	99,99	19.564
Inspektorat	3.498.584.000	320.760.492	311.737.011	97,19	9.023.481

Keterangan: Aplikasi Smart, Desember 2024 (diolah)

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran periode Oktober s.d Desember 2024 adalah 76,17%. Pada tabel di atas terlihat bahwa unit kerja dengan nilai persentase realisasi anggaran terbesar adalah Staf Ahli Menteri (99,99%). Sementara unit kerja dengan nilai persentase realisasi anggaran terendah adalah Biro Komunikasi (70,78%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3.Potensi dan Permasalahan	2
1.4.Sumber Daya.....	4
1.5.Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1 Capaian Kinerja <i>Quick Wins</i> Setmenko Marves Tahun 2024	8
<i>Quick Wins</i> 1.....	8
<i>Quick Wins</i> 2.....	9
<i>Quick Wins</i> 3.....	10
3.2 Realisasi Anggaran	11
BAB IV PENUTUP.....	13
4.1.Kesimpulan.....	13
4.2.Rekomendasi.....	13
LAMPIRAN.....	14

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1 Realisasi Anggaran Periode Oktober s.d Desember Tahun 2024.....ii

Tabel 2 Rincian Sarana dan Prasarana..... 5

Tabel 3 Sumber Daya Keuangan 6

Tabel 4 Realisasi Anggaran Periode Oktober s.d Desember Tahun 2024..... 12

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko..... 2

Gambar 2 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra..... 4

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan *quick wins* Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada periode Oktober s.d Desember 2024.

Penyusunan laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko sebagai bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kemenko Marves;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemenko Marves;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Marves;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. Pengelolaan data dan informasi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari:

1. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, dan pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, serta dukungan kerja sama di Kementerian Koordinator.
2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi
Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi dan informasi hukum, perencanaan, pengadaan, dan

pengembangan sumber daya manusia, dan penataan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator.

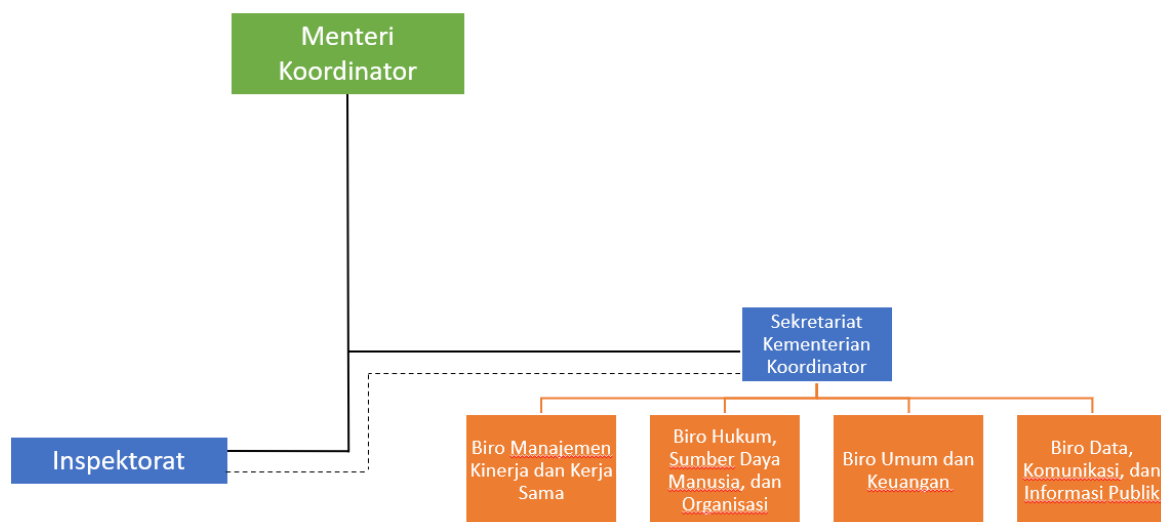
3. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator.

4. Biro Umum dan Keuangan

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, kerumahtanggaan, layanan pengadaan, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan kearsipan dan persuratan.

Selain membawahi 4 (empat) biro tersebut di atas, Setmenko Infra, atas nama Menteri Koordinator, juga mengoordinasikan unit kerja Inspektorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator. Bagan struktur organisasi Setmenko dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko

Dalam struktur organisasi Kemenko Infra, sesuai dengan Permenko Nomor 1 Tahun 2024, Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator. Sehingga dalam penyajian Laporan Setmenko ini memasukan capaian kinerja yang dihasilkan/menjadi tanggung jawab Inspektorat.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Setmenko Infra dihadapkan dengan berbagai isu strategis sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin berikut.

1.3.1 Lingkungan Internal

- Sumberdaya Manusia

Perubahan organisasi yang dihadapi oleh Kemenko Infra mempengaruhi ketersediaan dan kondisi sumber daya manusia (SDM). Kemenko Infra yang merupakan bagian dari pemisahan Kemenko Marves mendapatkan sebagian besar jumlah pegawai ex Kemenko Marves, yakni berjumlah 465 pegawai. Sehingga

dilakukan pemetaan sumber daya manusia yang termasuk dalam PNS (357 pegawai) maupun Non PNS (108 pegawai).

Meskipun demikian, masih terdapat PNS dengan status dipekerjakan (DPK) dan penugasan yang belum dapat dialihkan secara otomatis, sehingga perlu dilakukan dengan proses mutasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai pedoman, Setmenko Infra telah Menyusun Permenko No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

- Dukungan Sarana dan Prasarana

Dengan adanya perubahan pada unit kerja eselon I dan II lingkup Kemenko Infra, serta pembagian penggunaan Gedung dengan 3 Instansi (Kemenko Infra, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Badan Karantina Indonesia) dibutuhkan penambahan dukungan sarana dan prasarana kerja yang dipenuhi secara bertahap. Selain penyediaan ruang kerja, terdapat pula dukungan sarana prasarana TIK untuk menunjang tugas-tugas dan tanggung jawab Sekretariat Kementerian Koordinator dalam menyelenggarakan SPBE. Ini merupakan kekuatan yang harus dibangun, dikembangkan dan dipelihara terus menerus.

- Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran dimaksud sebagian besar digunakan untuk menyiapkan sarana-prasarana, pengembangan kompetensi SDM dan biaya operasional kantor.

- Dukungan Kelembagaan dan Regulasi

Dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang tugas, penguatan organisasi, implementasi proses bisnis dan SOP, serta implementasi budaya kerja.

1.3.2 Lingkungan Eksternal

- Regulasi dan Kebijakan

Sejalan dengan Visi Misi Presiden dalam Asta Cita, Kemenko Infra akan melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada sektor, Kementerian dan Lembaga yang berada dibawah koordinasi langsung serta K/L lain yang terkait. Selain itu membentuk struktur organisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah begitu pesat. Berbagai aplikasi berbasis TIK dalam pengelolaan pemerintahan telah tersedia dan/atau dapat dibangun. Hal ini akan memberikan kemudahan, meningkatkan akurasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

Teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi saat ini telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain Pengelolaan keuangan dan BMN, Penganggaran pembangunan, Pengelolaan kinerja, Pengelolaan kepegawaian, Pengelolaan data, dan lain-lain.

- Kondisi Lingkungan

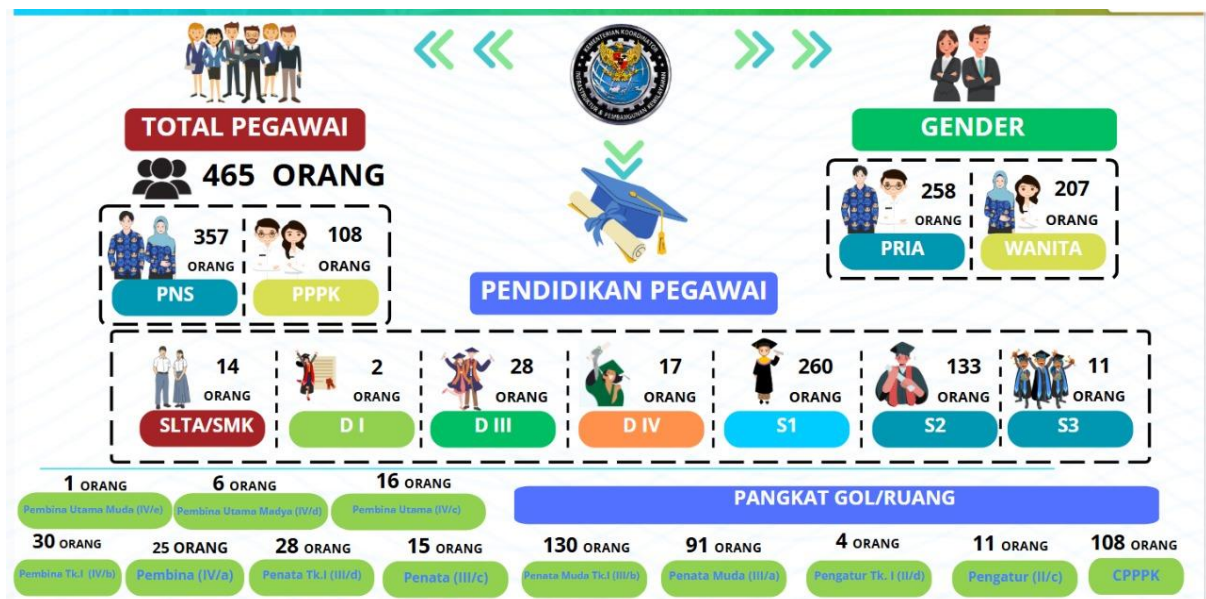
Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pekerjaan di bidang kesekretariatan adalah faktor lingkungan, baik lingkungan hidup, sosial ekonomi maupun lainnya. Dalam bidang sosial politik, sebagai dampak perkembangan teknologi informasi, berkembang pula paham radikalisme yang dapat membahayakan ketahanan negara. Ini juga menjadi tantangan untuk membentengi

ASN dari paham radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan azas negara Pancasila.

1.4. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Infra sampai dengan saat ini memiliki 465 pegawai terdiri dari 258 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan rincian PNS 357 pegawai dan Calon Tenaga PPPK 108 pegawai. Jumlah pegawai berstatus PNS berjenis kelamin laki-laki 258 orang, dan perempuan 207 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 2 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra

Seperti terlihat pada gambar di atas, jumlah pegawai Kemenko Infra berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 357 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut: Pembina Utama Madya (IV/d) berjumlah 6 pegawai; Pembina Utama (IV/c) berjumlah 16 pegawai; Pembina Utama Muda (IV/c) berjumlah 1 pegawai; Pembina Tk.I (IV/b) berjumlah 30 pegawai; Pembina (IV/a) berjumlah 25 pegawai; Penata Tk.I(III/d) berjumlah 28 pegawai; Penata (III/c) berjumlah 15 pegawai; Penata Muda Tk.I (III/b) berjumlah 130 pegawai; Penata Muda (III/a) berjumlah 91 pegawai; Pengatur Tk.I (II/d) berjumlah 4 pegawai; Pengatur (II/c) berjumlah 11 pegawai dan CPPK 108 Orang.

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan didukung dengan adanya sumber daya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Jl M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, juga didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran. Adapun data yang kami sajikan diantaranya sebagai berikut.

Tabel 2 Rincian Sarana dan Prasarana

URAIAN		JUMLAH	2023 SATUAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	Keterangan
KAS					-
TANAH/GEDUNG/BANGUNAN					Kemenko Marves
Sertifikat					SHM
a.	Tanah			229.663.659.000	
	Jl. Thamrin - Jakarta	1.976	m ²	223.987.714.000	Kemenko Marves
	Semenan - Kalideres	613	m ²	5.675.945.000	Kemenko Marves
b.	Gedung/Bangunan			196.497.132.618	
	Jl. Thamrin – (Kantor)	21.307	m ²	195.592.602.618	Kemenko Marves
	Semenan – Kalideres (Gudang)	780	m ²	904.530.000	Kemenko Marves
	Parkir VVIP		m ²	9.223.684.931	Kemenko Marves
KENDARAAN BERMOTOR					
1.	Roda 2	19	unit	334.116.800	Belanja Modal (APBN)
2.	Roda 4	61	unit	20.944.120.000	Belanja Modal (APBN)
INVENTARIS LAINNYA					
1.	Electric Generating Set	1	unit	12.747.544.600	Belanja Modal (APBN)
2.	Alat Bengkel Bermesin	3	unit	7.623.000	Belanja Modal (APBN)
3.	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	unit	3.477.250	Belanja Modal (APBN)
4.	Alat Ukur	30	unit	241.040.818	Belanja Modal (APBN)
5.	Alat Kantor	689	unit	10.058.198.365	Belanja Modal (APBN)
6.	Alat Rumah Tangga	3459	unit	30.094.656.534	Belanja Modal (APBN)
7.	Alat Studio	275	unit	5.004.585.379	Belanja Modal (APBN)
8.	Alat Komunikasi	137	unit	903.013.278	Belanja Modal (APBN)
9.	Alat Pemancar	10	unit	133.453.500	Belanja Modal (APBN)
10.	Alat Kedokteran	25	unit	329.374.630	Belanja Modal (APBN)
11.	Alat Kesehatan Umum	3	unit	76.560.000	Belanja Modal (APBN)
12.	Alat Kebersihan dan Kesehatan	28	unit	148.344.300	Belanja Modal (APBN) : Extraction Filter, Vacuum Cleaner Wet & Dry, TV Monitor, Microwave Oven, Water Distillation Purifier, Wash Bak
13.	Recorder	3	unit	47.511.954	Belanja Modal (APBN)
14.	Infrared Thermometer	5	unit	20.557.000	Belanja Modal (APBN)
15.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1	unit	24.300.000	Belanja Modal (APBN) : Transciever
16.	Alat Pengelola Air	2	unit	687.385.000	Belanja Modal (APBN) : Cooling Tower, Wireless Data Transmission System
17.	Alat untuk Metal Detector	1	unit	49.555.555	Belanja Modal (APBN) : Alat Khusus Keamanan Lainnya
18.	Alat Pembaca Barcode	17	unit	48.190.000	Belanja Modal (APBN) : Barcode Reader, Battery Handycam
19.	Komputer Unit	1.019	unit	17.490.052.242	Belanja Modal (APBN)
20.	Alat Komputer	727	unit	20.494.465.659	Belanja Modal (APBN)
21.	Alat Pelindung Kesehatan	1	unit	21.450.000	Belanja Modal (APBN)
22.	Alat SAR	7	unit	97.845.000	Belanja Modal (APBN)
23.	Alat Kerja Perekam	8	unit	18.903.600	Belanja Modal (APBN) : Voice Recorder
24.	Unit Peralatan Proses/Produksi	1	unit	1.518.000	Belanja Modal (APBN)
25.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	unit	6.400.000	Belanja Modal (APBN)
26.	Alat Olah Raga	6	unit	97.385.200	Belanja Modal (APBN)
27.	Aset Tetap Lainnya	211	unit	258.032.100	Belanja Modal (APBN)
28.	Aset Tak Berwujud	42	unit	3.813.802.310	Belanja Modal (APBN)

3. Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selama kinerja periode Oktober s.d Desember TA. 2024 masih melanjutkan sisa anggaran Kemenko Marves yang sebelumnya telah disahkan dengan DIPA Induk Nomor: SP DIPA- 120.01.1.350494/2024 tanggal 24 November 2023, sehingga nomenklatur mata anggaran yang digunakan masih menggunakan unit kerja lingkup Kemenko Marves. Rincian pagu anggaran yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3 Sumber Daya Keuangan

Es2	Deskripsi	Pagu Awal (Kemenko Marves)	Pagu Oktober s.d Desember (Kemenko Infra)
	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	310.723.938.000	39.602.647.659
S	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	203.179.955.000	29.771.939.027
S1	Biro Umum	158.040.100.000	24.082.869.967
S2	Biro Perencanaan	7.844.952.000	2.071.113.751
S3	Biro Hukum	7.973.140.000	1.110.658.375
S4	Biro Komunikasi	24.379.847.000	1.949.959.578
S6	Inspektorat	1.443.332.000	236.576.864

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 Setmenko Infra adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan; Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang: tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumberdaya Setmenko Infra serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja; Diuraikan mengenai: rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2024, dan pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 1) Realisasi Kinerja Setmenko Infra
- 2) Realisasi Anggaran
- 3) Realisasi Kinerja lainnya
 - Tugas Tambahan program dan kegiatan Setmenko Infra;
 - Capaian lainnya.

Bab IV Penutup; Berisikan penjelasan kesimpulan dan tindaklanjut dimasa depan

Lampiran; berisikan dokumen yang mendukung informasi terkait Bab sebelumnya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Setmenko Infra diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Setmenko sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing.

Namun dikarenakan kinerja periode 2024 Kemenko Infra yang hanya berlangsung selama bulan Oktober s.d Desember 2024, maka kinerja yang diukur hanya berdasarkan program *quick wins* Kemenko Infra. Program *quick wins* Kementerian Koordinator yang dilaksanakan oleh unit Setmenko diantaranya:

1. Percepatan pengembangan organisasi Kementerian Koordinator, antara lain:
 - a. Penyusunan Permenko SOTK tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kemenko
 - b. Percepatan rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia, baik pegawai maupun pejabat kementerian
2. Menyusun Perencanaan Infrastruktur Strategis
3. Mengoordinasikan program 100 hari Kementerian/Lembaga sektor Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Visi Kemenko Infra adalah pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Indonesia secara produktif, multiguna, terpadu, berkesinambungan, efisien, dan berkelanjutan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8% dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden tahun 2024-2029. Sehingga visi Setmenko ditetapkan untuk membantu mewujudkan visi Kemenko Infra tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Dengan berlakunya Perpres Nomor 140 Tahun 2024, Sekretariat Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menindaklanjuti dengan menyusun laporan kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja berdasarkan *quick wins* dari bulan Oktober s.d Desember 2024. Mengingat kondisi Renstra Kemenko Infra periode 2024-2029 dan Perjanjian Kinerja yang masih dalam tahap penyusunan, maka laporan kinerja ini belum dapat menyajikan penghitungan capaian kinerja.

3.1 Capaian Kinerja *Quick Wins* Setmenko Marves Tahun 2024

Capaian dari masing-masing *quick wins* Setmenko Infra periode Oktober s.d Desember 2024 yakni sebagai berikut.

Quick Wins 1

Percepatan pengembangan organisasi Kementerian Koordinator

Dengan kabinet baru yang terbentuk, pemerintah melakukan penyesuaian struktur kementerian untuk lebih fokus pada efisiensi dan optimalisasi tugas serta fungsi lembaga negara. Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menanggapi tantangan global dan domestik dengan pendekatan yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Percepatan pengembangan organisasi Kementerian Koordinator didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

A. Penyusunan Permenko SOTK tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kemenko

Penyusunan Permenko terkait penataan organisasi dan tata kerja ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta bertujuan untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Infra.

Selama periode Oktober s.d Desember, Setmenko Infra telah menyelesaikan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. **Faktor pendukung** tersusunnya dokumen Permenko yakni:

1. Adanya Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029
2. Adanya Perpres No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
3. Penataan organisasi dan tata kerja Kemenko Infra telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Meskipun dokumen Permenko telah berhasil disusun, Setmenko Infra melalui beberapa **faktor penghambat** dalam pencapaiannya, yakni:

1. Belum adanya Proses Bisnis terkait Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai dasar pembentukan OTK
2. Menentukan Urusan dan Fungsi Kemenko Infra ke Unit Kerja Eselon I dan II

Sebagai tindak lanjut, Setmenko Infra akan melaksanakan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis.

B. Percepatan rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia, baik pegawai maupun pejabat kementerian

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. SDM di instansi pemerintah terdiri dari pegawai yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi kebijakan publik. Selama periode Oktober s.d Desember, beberapa capaian kegiatan yakni:

1. Telah diselenggarakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
2. Telah dilaksanakan Seleksi PPPK Tahap 1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2024. Jumlah pegawai PPPK yang diterima sebanyak 101 orang.
3. Telah ditetapkan SK dari BKN terkait pengalihan ASN Eks Kemenko Marves yang dialihkan ke Kemenko Infrawil, Kemenko Pangan, dan Kemenko Perekonomian.

Faktor pendukung tercapainya kegiatan ini yakni pemetaan PNS Kemenko Marves yang beralih ke Kemenko Infrawil, Kemenko Pangan dan Kemenko Ekon telah dilakukan sejak awal sehingga pengalihan di SIASN dapat berjalan dengan baik. sementara **faktor penghambat** yang ditemui yakni adanya PNS dengan status dipekerjakan (DPK) dan penugasan yang belum dapat dialihkan secara otomatis, sehingga dilakukan dengan proses mutasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Terlaksananya kinerja yang baik oleh Setmenko Infra serta adanya dukungan pimpinan, Kemenko Infra termasuk dalam Kementerian yang cepat dalam pengalihan pegawai dengan TMT Pengalihan di 1 Januari 2025. Sebagai tindak lanjut, proses mutasi PNS dengan status DPK dan Penugasan telah diajukan Surat Persetujuan Mutasi dan Surat Persetujuan Penugasan ke instansi asal masing-masing.

Quick Wins 2

Menyusun Perencanaan Infrastruktur Strategis

Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam mendukung pencapaian visi misi Presiden, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Kemenko Infra memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan strategis yang baik guna mendukung visi, misi, dan tugas tersebut.

Sejalan dengan Visi Misi Presiden dalam Asta Cita, Kemenko Infra akan melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada sektor, Kementerian dan Lembaga yang berada dibawah koordinasi langsung serta K/L lain yang terkait melalui pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, diantaranya:

1. Mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata melalui pembangunan infrastruktur dan kewilayahan
2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Mendukung swasembada pangan, energi, air
4. Memenuhi *Sustainable Development Goals* dan komitmen *Net Zero Emission*

Terdapat 8 dari 45 indikator pembangunan yang tertera dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2025-2029 yang menjadi fokus Kemenko Infra. Fokus Kemenko Infra ini dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), yang hingga saat ini masih dalam proses penyusunan *draft*. Hal ini disebabkan belum adanya dokumen RPJMN sebagai acuan penyusunan program, sehingga penyelesaian penyusunan Renstra terhambat.

Selain itu, Setmenko Infra juga telah melakukan pemetaan anggaran Kemenko Infra. Pada Tahun Anggaran 2025, Kemenko Infra melanjutkan besaran pagu anggaran ex Kemenko Marves. Namun mengingat adanya pengalihan fungsi dari Kemenko Marves ke Kemenko Pangan, Pagu Anggaran Kemenko Marves sebesar Rp274M harus dialihkan sebesar Rp44M kepada Kemenko Pangan. Sehingga Pagu Anggaran Kemenko Infra menjadi 230M. Terdapat 2 (dua) Program dalam Kelompok Anggaran Tahun 2025, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen (Dukman). Untuk Anggaran Kesekretariatan (Setmenko), Sesdep, Inspektorat sebesar Rp177,559 M. Program Dukman digunakan untuk belanja Gaji dan Tunjangan pegawai, Operasional kantor dan non operasional lainnya.
2. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Untuk Anggaran di 4 (empat) Kedeputan sebesar Rp52,44 M

Anggaran Kemenko Infra untuk TA 2025 sebesar Rp 230M belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dan diusulkan anggaran tambahan di tahun 2025 sebesar Rp273.143.736.000. Dengan usulan anggaran ini, diharapkan Pagu DIPA Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Tahun 2025 menjadi Rp. Rp503.143.736.000.

Quick Wins 3

Mengoordinasikan program 100 hari Kementerian/Lembaga sektor Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Sebagai Kementerian Koordinator, Kemenko Infra memiliki fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kemenko Infra kini membawahi lima kementerian teknis, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

Program/*quick wins* 100 hari merupakan *highlight* program K/L yang perlu diselesaikan di Tahun 2024. Prioritas koordinasi per K/L dibawah koordinasi Kemenko Infra antara lain:

1. Kementerian ATR/BPN
 - Pendaftaran 1,5 jt bidang tanah (2024), dan sisa 7,5 jt bidang tanah (didaftarkan) hingga 2025.
 - Percepatan 25 kabupaten/kota untuk memenuhi 104 target kabupaten/kota lengkap yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN.
 - Pengesahan revisi PP nomor 18/2021 untuk mengakomodir kegiatan *carbon trading*.
 - Penyiapan infrastruktur pendukung transformasi digital pertanahan dan tata ruang
 - Koordinasi penyiapan RDTR (target 2000 RDTR).
2. Kementerian Pekerjaan Umum
 - Pembangunan sekolah dan revitalisasi sekolah dan madrasah (rehabilitasi ruang kelas, pembangunan pra sarana sekolah)
 - Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung
 - Memperkuat tata kelola (*governance*) pengadaan untuk mencegah kebocoran anggaran
 - Mendorong percepatan penyiapan lahan pertanian
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - Persiapan pembangunan 3 juta rumah baru
 - Prioritas pembangunan rumah baru untuk: TNI, Polri, ASN, Staf BUMN dengan tingkat penghasilan tertentu.
4. Kementerian Perhubungan
 - Transportasi darat: pengawasan aturan angkutan barang; implementasi *multi lane free flow* (MLFF) dan transaksi nirsentuh *telectronic on board unit* (e-obu).
 - Transportasi laut: penambahan pelabuhan untuk diintegrasikan sistem inaportnet dengan *national logistic ecosystem*
 - Transportasi udara: pengendalian harga tiket angkutan udara; pemanfaatan *drone* untuk kegiatan logistik.
 - Perkeretaapian: *infrastructure maintenance operation* (IMO) & *track access charge* (TAC); regulasi penyelenggaraan trem otonom.
5. Kementerian Transmigrasi
 - Penetapan daftar dan jumlah kawasan transmigrasi baru sebagai program kementerian transmigrasi.
 - Silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di Indonesia timur, khususnya di Papua.
 - Program beasiswa kementerian bagi anak-anak muda potensial dari Indonesia timur, untuk sekolah di Jawa.
 - Ekspor komoditas unggulan dari program pembangunan kewilayahan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Sebagai tindak lanjut, Kemenko Infra akan terus melakukan koordinasi terkait penyelesaian program 100 hari oleh 5 K/L terkait dengan menggunakan pendekatan integratif serta memastikan pencapaian kinerja baik dan dapat diketahui publik.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran yang digunakan oleh Kemenko Infra selama kinerja periode Oktober s.d Desember 2024 yakni sisa anggaran yang dimiliki Kemenko Marves, sehingga nomenklatur mata anggaran yang digunakan masih menggunakan unit kerja lingkup Kemenko Marves.

Realisasi anggaran periode Oktober s.d Desember 2024 yakni sebesar Rp22.676.724.033,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp29.771.939.027,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau 76,17%. Adapun rincian realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4 Realisasi Anggaran Periode Oktober s.d Desember Tahun 2024

Deskripsi	Pagu Awal (Rp)	Pagu Oktober s.d Desember (Rp)	Realisasi		Sisa
			Rp	%	
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	310.723.938.000	39.602.647.659	31.658.677.189	79,94	7.943.970.470
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	203.179.955.000	29.771.939.027	22.676.724.033	76,17	7.095.214.994
Biro Umum	158.040.100.000	24.082.869.967	18.184.685.058	75,51	5.898.184.909
Biro Perencanaan	7.844.952.000	2.071.113.751	1.480.713.458	71,49	590.400.293
Biro Hukum	7.973.140.000	1.110.658.375	1.082.776.106	97,49	27.882.269
Biro Komunikasi	24.379.847.000	1.949.959.578	1.380.255.100	70,78	569.704.478
Staf Ahli Menteri	1.443.332.000	236.576.864	236.557.300	99,99	19.564
Inspektorat	3.498.584.000	320.760.492	311.737.011	97,19	9.023.481

Keterangan: Aplikasi Smart, Desember 2024 (diolah)

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran periode Oktober s.d Desember 2024 adalah 76,17%. Pada tabel di atas terlihat bahwa unit kerja dengan nilai persentase realisasi anggaran terbesar adalah Staf Ahli Menteri (99,99%). Sementara unit kerja dengan nilai persentase realisasi anggaran terendah adalah Biro Komunikasi (70,78%).

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Laporan kinerja ini menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan *quick wins*/program 100 hari Setmenko Infra periode Oktober s.d Desember 2024. Laporan ini menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target dan *output* yang dihasilkan.
2. Secara umum, Setmenko Infra telah melaksanakan program 100 hari dengan baik ditandai dengan *output* berupa ditetapkan nya regulasi struktur organisasi Kemenko Infra.
3. Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kemenko Infra belum dapat diselesaikan, karena dokumen RPJMN yang menjadi pedoman belum ada. Meskipun begitu Setmenko Infra telah menyusun *draft* Rencana Strategis dan dokumen pendukungnya.
4. Setmenko Infra akan berupaya menyelesaikan beberapa target yang belum tercapai dan tetap melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan program 100 hari 5 K/L dibawah koordinasi Kemenko Infra.

4.2. Rekomendasi

Untuk perbaikan dimasa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung upaya pencapaian kinerja kesekretariatan.
2. Memperkuat koordinasi dengan K/L terkait dalam peningkatan kualitas capaian kinerja.
3. Laporan Kinerja agar dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran I. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Mengingat :**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun